



Pemberdayaan Masyarakat dan Pengembangan Pariwisata Berkelanjutan di Kecamatan Mangarabombang: Sebuah Evaluasi Kebijakan

Nasir^{1*}, Sudirman², Salmah Harun³

¹ Universitas Negeri Makassar

²³ Politeknik Lembaga Pendidikan dan Pengembangan Profesi Indonesia Makassar

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan pengembangan pariwisata berbasis pemberdayaan masyarakat di Kecamatan Mangarabombang, Kabupaten Takalar. Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan pendekatan wawancara kepada pemerintah kecamatan dan pelaku usaha pariwisata setempat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengembangan pariwisata di daerah ini belum berjalan optimal, terutama karena kurangnya penerapan prinsip-prinsip implementasi kebijakan yang tepat. Koordinasi dan komunikasi antara pemerintah kabupaten dan kecamatan masih lemah, sehingga menghambat proses pengembangan. Selain itu, pemberdayaan masyarakat sebagai elemen kunci tidak sepenuhnya disesuaikan dengan kondisi sosial-ekonomi masyarakat, yang mayoritas bekerja di sektor pertanian. Ditemukan pula adanya ego sektoral di antara lembaga pemerintah yang turut menghambat efektivitas program. Sebagai solusi, disarankan adanya integrasi antara pengembangan sektor pertanian dan pariwisata, serta pembentukan unit khusus pengembangan pariwisata di tingkat kecamatan untuk memperbaiki koordinasi dan komunikasi. Penelitian ini menekankan pentingnya kolaborasi yang lebih baik antar pemangku kepentingan dan evaluasi kebijakan yang menyeluruh untuk meningkatkan efektivitas pengembangan pariwisata di wilayah Mangarabombang.

Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, Pengembangan Pariwisata, Pemberdayaan Masyarakat.

DOI: <https://doi.org/10.47134/rei.v1i1.7>

*Correspondence: Nasir

Email: nasir@unm.ac.id

Received: 22-05-2024

Accepted: 21-06-2024

Published: 24-07-2024



Copyright: © 2024 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (BY SA) license (<http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>).

Abstract: This study aims to analyze the implementation of community empowerment-based tourism development policies in Mangarabombang District, Takalar Regency. The method used is qualitative descriptive with an interview approach to the sub-district government and local tourism business actors. The results of the study show that tourism development in this area has not run optimally, mainly due to the lack of implementation of the right policy implementation principles. Coordination and communication between the district and sub-district governments are still weak, hindering the development process. In addition, community empowerment as a key element is not fully adapted to the socio-economic conditions of the community, the majority of whom work in the agricultural sector. It was also found that there was a sectoral ego among government agencies that also hindered the effectiveness of the program. As a solution, it is suggested that there is an integration between the development of the agricultural and tourism sectors, as well as the establishment of a special unit for tourism development at the sub-district level to improve coordination and communication. This study emphasizes the importance of better collaboration between stakeholders and a thorough policy evaluation to improve the effectiveness of tourism development in the Mangarabombang area.

Keywords: Policy Implementation, Tourism Development, Community Empowerment.

Pendahuluan

Pengembangan pariwisata merupakan salah satu strategi penting dalam meningkatkan perekonomian daerah, terutama di wilayah yang memiliki potensi wisata unggulan. Pemerintah daerah seringkali menetapkan kebijakan berbasis pariwisata untuk memaksimalkan potensi lokal serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kecamatan Mangarabombang, Kabupaten Takalar, merupakan salah satu wilayah yang ditetapkan sebagai daerah berbasis pariwisata. Namun, implementasi kebijakan pengembangan pariwisata ini belum berjalan optimal. Beberapa permasalahan yang dihadapi mencakup kurangnya koordinasi antara pemerintah kabupaten dan kecamatan, serta ketidaksesuaian antara kebijakan pemberdayaan masyarakat dengan kondisi sosial-ekonomi lokal yang didominasi oleh sektor pertanian (Rusyidi & Fedryansah, 2019).

Selain itu, faktor komunikasi yang lemah antara pemangku kepentingan serta ego sektoral antar lembaga pemerintah turut memperlambat efektivitas implementasi kebijakan. Sebagaimana dikemukakan oleh Silaban et al. (2017), keberhasilan pengembangan pariwisata sangat bergantung pada sinergi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat. Oleh karena itu, kajian ini bertujuan untuk menganalisis permasalahan dalam implementasi kebijakan pengembangan pariwisata berbasis pemberdayaan masyarakat di Kecamatan Mangarabombang serta menawarkan solusi melalui pendekatan yang lebih terintegrasi (Hasibuan, 2024).

Teori implementasi kebijakan menjelaskan bahwa keberhasilan suatu kebijakan sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti koordinasi antar lembaga, komunikasi yang efektif, dan keterlibatan masyarakat (Creswell, 2009). Menurut Edwards III (1980), keberhasilan implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel utama, yakni komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Komunikasi yang baik antara pembuat kebijakan dan pelaksana di lapangan sangat penting untuk memastikan program berjalan sesuai rencana. Selain itu, ketersediaan sumber daya yang mencakup anggaran, infrastruktur, dan sumber daya manusia yang kompeten juga sangat menentukan (Turisno, 2024).

Dalam konteks pengembangan pariwisata, konsep pemberdayaan masyarakat merupakan komponen penting yang mendukung keberlanjutan kebijakan. Pemberdayaan masyarakat berarti memberikan kemampuan dan kesempatan kepada masyarakat lokal untuk ikut serta dalam proses pembangunan, khususnya dalam sektor pariwisata (Rusyidi & Fedryansah, 2019). Good governance juga menjadi kerangka penting dalam implementasi kebijakan, karena mendorong keterlibatan berbagai pemangku kepentingan, transparansi, dan akuntabilitas (Sinaga et al., 2018).

Lebih lanjut, kebijakan pengembangan pariwisata harus mempertimbangkan aspek keberlanjutan. Menurut Dangi & Jamal (2016), pengembangan pariwisata yang berkelanjutan memerlukan pendekatan yang terintegrasi, di mana perhatian diberikan pada dampak sosial, ekonomi, dan lingkungan. Hal ini juga didukung oleh penelitian dari Ramkisson (2020) yang menekankan bahwa keterlibatan masyarakat lokal dalam perencanaan dan pelaksanaan kebijakan pariwisata sangat penting untuk menciptakan kesadaran lingkungan dan memperkuat identitas budaya local (Yunikawati, 2022).

Kebijakan berbasis pariwisata sering kali menghadapi tantangan dalam hal adaptasi dengan kondisi lokal. Menurut Hendrita (2017), kebijakan yang diterapkan tanpa

memperhatikan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat setempat seringkali gagal mencapai tujuannya (Murniati, 2021). Oleh karena itu, penting untuk memastikan bahwa kebijakan tersebut selaras dengan kondisi masyarakat lokal, seperti halnya di Mangarabombang, di mana mayoritas masyarakat bekerja di sektor pertanian. Nurhadi (2014) juga menggarisbawahi bahwa kebijakan pengembangan pariwisata yang sukses adalah yang mampu mengakomodasi potensi lokal sekaligus memberikan manfaat ekonomi langsung kepada masyarakat.

Keterlibatan sektor swasta dalam pengembangan pariwisata juga menjadi faktor yang sangat penting. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Sinaga et al. (2018), kemitraan antara pemerintah dan sektor swasta dapat membantu dalam pengembangan infrastruktur pariwisata yang lebih baik. Namun, sinergi yang kuat antara pemerintah daerah dan pelaku usaha masih menjadi tantangan besar di banyak daerah, termasuk di Kecamatan Mangarabombang (Oktadiana, 2024).

Perkembangan teknologi informasi juga memberikan pengaruh besar dalam promosi dan pengelolaan destinasi wisata. Teknologi dapat digunakan untuk mempromosikan destinasi pariwisata secara lebih luas dan efisien, serta membantu menciptakan pengalaman wisata yang lebih interaktif (Wang et al., 2016). Oleh karena itu, penting bagi pemerintah daerah untuk mengintegrasikan teknologi dalam kebijakan pengembangan pariwisata agar dapat bersaing di era digital ini.

Secara keseluruhan, teori-teori ini menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan pengembangan pariwisata sangat bergantung pada sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta, serta penyesuaian kebijakan dengan kondisi sosial-ekonomi lokal (Setyanti, 2024).

Metodologi

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif untuk memahami implementasi kebijakan pengembangan pariwisata berbasis pemberdayaan masyarakat di Kecamatan Mangarabombang, Kabupaten Takalar. Metode deskriptif kualitatif dipilih karena mampu menggambarkan fenomena secara mendalam berdasarkan kondisi lapangan yang ada. Proses pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam dengan berbagai pemangku kepentingan, seperti pemerintah kecamatan, pelaku usaha pariwisata, dan masyarakat lokal. Data yang dikumpulkan dianalisis secara induktif, dengan tujuan untuk menemukan pola-pola dan tema yang relevan terkait dengan permasalahan yang dihadapi dalam implementasi kebijakan. Pendekatan ini digunakan untuk memahami dinamika komunikasi, koordinasi, dan pemberdayaan masyarakat dalam konteks pengembangan pariwisata. Selain itu, metode ini memungkinkan peneliti untuk menafsirkan secara lebih rinci tantangan-tantangan yang dihadapi dalam proses implementasi kebijakan dan menawarkan solusi yang sesuai dengan kondisi sosial-ekonomi masyarakat setempat. Penelitian dilaksanakan selama periode Juli hingga Oktober 2024 di Kecamatan Mangarabombang, dengan fokus pada pengembangan pariwisata bahari yang berbasis pada pemberdayaan masyarakat lokal (Prayitno, 2023).

Pembahasan

Penelitian ini menyoroti berbagai permasalahan dalam implementasi kebijakan pengembangan pariwisata berbasis pemberdayaan masyarakat di Kecamatan Mangarabombang, Kabupaten Takalar. Salah satu temuan utama yang muncul dari penelitian ini adalah lemahnya koordinasi antara pemerintah Kabupaten Takalar dan pemerintah Kecamatan Mangarabombang. Kurangnya sinergi antar pemerintah daerah ini terlihat dari minimnya keterlibatan pemerintah kecamatan dalam perencanaan dan pelaksanaan kebijakan pengembangan pariwisata. Pemerintah kabupaten sering kali merumuskan kebijakan tanpa memperhatikan kebutuhan dan kondisi lokal yang ada di tingkat kecamatan, sehingga program-program yang dijalankan kurang relevan dengan kondisi di lapangan (Fajri, 2024). Hal ini berdampak pada pelaksanaan kebijakan yang tidak optimal dan kurangnya keberhasilan dalam mencapai tujuan pengembangan pariwisata.

Sebagai contoh, dalam beberapa proyek pembangunan infrastruktur pariwisata, pemerintah kecamatan tidak dilibatkan sejak awal dalam proses perencanaan, meskipun mereka memiliki pengetahuan lebih mendalam mengenai kondisi lokal. Ini menyebabkan terjadinya berbagai hambatan di lapangan, seperti ketidaksesuaian fasilitas yang dibangun dengan kebutuhan wisatawan atau masyarakat lokal. Lebih jauh lagi, ego sektoral antara instansi di tingkat kabupaten memperparah kondisi ini. Beberapa program pengembangan yang seharusnya membutuhkan keterlibatan berbagai pihak, termasuk pemerintah kecamatan dan masyarakat, justru dikelola secara terpusat oleh pemerintah kabupaten. Akibatnya, koordinasi yang dibutuhkan untuk memastikan kesuksesan implementasi kebijakan tidak tercapai, yang berakibat pada keterlambatan dan ketidakberhasilan beberapa proyek pengembangan. Penemuan ini didukung oleh penelitian sebelumnya yang menunjukkan bahwa kurangnya koordinasi antar tingkatan pemerintahan sering menjadi hambatan dalam pengembangan pariwisata di daerah-daerah yang memiliki potensi besar (Rusyidi & Fedryansah, 2019).

Selain koordinasi yang buruk, penelitian ini juga menemukan bahwa komunikasi antara pemangku kepentingan di Mangarabombang masih belum berjalan dengan efektif. Hal ini terlihat dari minimnya dialog antara pemerintah daerah, pelaku usaha pariwisata, dan masyarakat lokal dalam proses perumusan dan implementasi kebijakan pariwisata. Komunikasi yang terbangun cenderung bersifat satu arah, di mana pemerintah menetapkan kebijakan tanpa melibatkan masukan dari pelaku usaha atau masyarakat. Akibatnya, banyak kebijakan yang tidak sesuai dengan kebutuhan pelaku usaha pariwisata di wilayah ini, terutama mereka yang bergerak di sektor usaha kecil dan menengah (UKM). Misalnya, pelaku usaha tradisional sering merasa kesulitan untuk memenuhi standar yang ditetapkan oleh pemerintah dalam pengelolaan destinasi wisata, karena mereka tidak mendapatkan dukungan yang cukup dalam bentuk pelatihan atau pembiayaan (Kawuryan, 2022).

Komunikasi yang buruk juga tercermin dalam rendahnya partisipasi masyarakat lokal dalam pengembangan sektor pariwisata. Masyarakat yang mayoritas bekerja di sektor pertanian kurang mendapatkan pemahaman yang cukup tentang manfaat dan peluang

yang dapat diperoleh dari pariwisata (Zulvianti, 2023). Selain itu, mereka merasa bahwa kebijakan yang ada tidak memberikan ruang bagi mereka untuk terlibat secara aktif dalam kegiatan pariwisata. Ketidakterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan terkait kebijakan pariwisata menyebabkan program pemberdayaan yang seharusnya menjadi fokus utama tidak berjalan dengan baik. Hal ini menjadi bukti bahwa komunikasi yang baik antara pemerintah dan masyarakat merupakan komponen penting dalam keberhasilan suatu kebijakan, terutama dalam konteks pengembangan pariwisata berbasis pemberdayaan masyarakat (Silaban et al., 2017).

Lebih lanjut, pemberdayaan masyarakat di Kecamatan Mangarabombang masih belum terlaksana secara maksimal, meskipun kebijakan pengembangan pariwisata menekankan pentingnya pelibatan masyarakat dalam pengelolaan destinasi wisata. Masyarakat setempat, yang mayoritas bekerja sebagai petani, belum sepenuhnya dilibatkan dalam kegiatan pariwisata. Program-program pemberdayaan yang dilaksanakan oleh pemerintah sering kali tidak disesuaikan dengan kondisi sosial-ekonomi masyarakat lokal, sehingga partisipasi masyarakat dalam pengelolaan pariwisata sangat rendah. Misalnya, beberapa pelatihan yang diberikan oleh pemerintah berfokus pada keterampilan teknis yang sulit diterapkan oleh masyarakat yang mayoritas adalah petani. Padahal, pemberdayaan masyarakat seharusnya memberikan mereka peluang untuk berpartisipasi dalam pengembangan pariwisata tanpa harus meninggalkan profesi utama mereka sebagai petani (Rusyidi & Fedryansah, 2019).

Kondisi ini semakin diperburuk oleh kurangnya infrastruktur pendukung yang memadai di Kecamatan Mangarabombang. Fasilitas pariwisata seperti akses jalan, transportasi umum, akomodasi, dan sarana hiburan masih belum memenuhi standar yang diharapkan oleh wisatawan. Sebagai destinasi wisata yang mengandalkan potensi wisata bahari, Mangarabombang seharusnya memiliki fasilitas yang mendukung kenyamanan dan kemudahan bagi wisatawan, baik lokal maupun mancanegara. Namun, keterbatasan anggaran dan buruknya koordinasi antar pemerintah menyebabkan pembangunan infrastruktur berjalan lambat. Misalnya, akses jalan menuju beberapa lokasi wisata masih buruk, sehingga wisatawan enggan untuk berkunjung. Kondisi ini tentu saja mengurangi daya tarik destinasi wisata Mangarabombang dibandingkan dengan destinasi lain di Sulawesi Selatan yang memiliki infrastruktur yang lebih baik (Hendrita, 2017).

Selain itu, fasilitas akomodasi dan restoran yang ada di Mangarabombang masih terbatas, sehingga wisatawan yang ingin menginap dalam jangka waktu yang lebih lama sering kali kesulitan menemukan tempat yang sesuai. Fasilitas penginapan yang ada sebagian besar hanya mampu melayani wisatawan dalam jumlah terbatas, dan banyak di antaranya belum memenuhi standar kenyamanan yang diinginkan wisatawan. Kurangnya fasilitas ini menjadi hambatan signifikan bagi pertumbuhan sektor pariwisata di Mangarabombang, karena wisatawan cenderung memilih destinasi lain yang lebih siap secara infrastruktur. Peningkatan fasilitas ini sangat penting, terutama jika Mangarabombang ingin bersaing dengan destinasi wisata lain di wilayah Sulawesi Selatan yang memiliki fasilitas lebih lengkap dan terjangkau (Dangi & Jamal, 2016).

Integrasi antara sektor pertanian dan pariwisata juga menjadi salah satu solusi yang diusulkan dalam penelitian ini untuk meningkatkan pemberdayaan masyarakat lokal. Sebagai daerah yang mayoritas penduduknya bekerja di sektor pertanian, Mangarabombang memiliki potensi besar untuk mengembangkan agrowisata, di mana wisatawan dapat menikmati pengalaman berinteraksi langsung dengan petani atau menikmati hasil pertanian lokal. Konsep ini dapat menjadi alternatif yang menarik untuk meningkatkan pendapatan petani sekaligus memperkaya pengalaman wisata bagi para pengunjung. Integrasi antara pertanian dan pariwisata juga dapat mengurangi ketergantungan masyarakat pada sektor pertanian tradisional yang sering kali terpengaruh oleh fluktuasi harga dan hasil panen. Dengan adanya integrasi ini, masyarakat dapat lebih terlibat dalam kegiatan pariwisata tanpa harus meninggalkan profesi utama mereka sebagai petani (Ramkissoon, 2020).

Promosi pariwisata Mangarabombang juga merupakan salah satu aspek yang sangat perlu ditingkatkan. Saat ini, pemerintah daerah belum memanfaatkan teknologi digital secara optimal untuk mempromosikan potensi wisata yang ada. Media sosial dan platform digital lainnya belum digunakan secara maksimal untuk memperkenalkan Mangarabombang kepada wisatawan domestik maupun mancanegara. Hal ini menyebabkan destinasi wisata Mangarabombang kurang dikenal oleh publik, sehingga jumlah kunjungan wisatawan pun masih relatif rendah. Padahal, di era digital saat ini, penggunaan teknologi informasi untuk promosi pariwisata dapat menjadi salah satu kunci keberhasilan dalam menarik wisatawan. Pemerintah daerah perlu meningkatkan kemampuan mereka dalam menggunakan media digital untuk mempromosikan destinasi wisata, seperti dengan membangun website yang informatif, aktif di media sosial, dan berkolaborasi dengan platform pariwisata online untuk mempromosikan Mangarabombang sebagai destinasi wisata unggulan (Wang et al., 2016).

Selain itu, keterlibatan sektor swasta dalam pengembangan pariwisata di Mangarabombang masih sangat terbatas. Pelaku usaha pariwisata di wilayah ini sebagian besar adalah pengusaha kecil dan menengah yang tidak memiliki akses yang memadai terhadap modal dan pelatihan. Mereka juga menghadapi berbagai kendala, seperti kurangnya dukungan pemerintah dalam bentuk insentif atau kemudahan perizinan untuk mengembangkan usaha mereka. Kondisi ini memperlambat pertumbuhan sektor pariwisata di Mangarabombang, karena sektor swasta memainkan peran penting dalam menyediakan fasilitas dan layanan yang dibutuhkan oleh wisatawan. Pemerintah perlu lebih proaktif dalam mendorong investasi dari sektor swasta, misalnya dengan memberikan insentif pajak, menyediakan program pelatihan yang relevan, atau memfasilitasi akses terhadap pembiayaan. Sinaga et al. (2018) menyatakan bahwa kemitraan antara pemerintah dan sektor swasta merupakan salah satu faktor kunci dalam keberhasilan pengembangan destinasi wisata di banyak daerah.

Dengan berbagai permasalahan yang ada, jelas bahwa implementasi kebijakan pengembangan pariwisata di Mangarabombang masih jauh dari optimal. Koordinasi yang buruk, komunikasi yang lemah, minimnya pemberdayaan masyarakat, serta infrastruktur yang belum memadai menjadi tantangan utama yang harus segera diatasi. Untuk

meningkatkan potensi Mangarabombang sebagai destinasi wisata unggulan, pemerintah perlu melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan yang ada dan meningkatkan sinergi dengan masyarakat serta sektor swasta. Pemerintah juga perlu fokus pada pembangunan infrastruktur yang mendukung pariwisata dan meningkatkan promosi digital agar destinasi ini lebih dikenal oleh wisatawan. Dengan demikian, diharapkan pengembangan pariwisata di Mangarabombang dapat memberikan dampak positif yang lebih besar bagi kesejahteraan masyarakat lokal dan ekonomi daerah.

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan pengembangan pariwisata berbasis pemberdayaan masyarakat di Kecamatan Mangarabombang, Kabupaten Takalar, masih menghadapi sejumlah tantangan signifikan. Koordinasi yang lemah antara pemerintah kabupaten dan kecamatan, serta kurangnya komunikasi yang efektif antara pemangku kepentingan, menjadi hambatan utama dalam keberhasilan implementasi kebijakan ini. Meskipun pemberdayaan masyarakat menjadi salah satu fokus kebijakan, pelaksanaannya belum optimal karena tidak disesuaikan dengan kondisi sosial-ekonomi masyarakat lokal, yang mayoritas bekerja di sektor pertanian.

Kurangnya infrastruktur pendukung, seperti fasilitas transportasi, akomodasi, dan sarana wisata lainnya, juga menghambat potensi Mangarabombang sebagai destinasi wisata unggulan. Selain itu, integrasi antara sektor pertanian dan pariwisata masih belum dimanfaatkan secara maksimal, meskipun agrowisata memiliki potensi besar untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dan pendapatan daerah. Promosi digital yang minim dan keterlibatan sektor swasta yang terbatas juga memperlambat pertumbuhan pariwisata di wilayah ini.

Untuk meningkatkan efektivitas pengembangan pariwisata di Mangarabombang, diperlukan perbaikan dalam koordinasi dan komunikasi antar pemerintah, serta peningkatan partisipasi masyarakat dan sektor swasta dalam pengelolaan pariwisata. Selain itu, pembangunan infrastruktur yang memadai dan promosi yang lebih kuat melalui platform digital juga sangat penting untuk meningkatkan daya tarik Mangarabombang sebagai destinasi wisata. Dengan perbaikan di berbagai aspek ini, pengembangan pariwisata di Mangarabombang diharapkan dapat memberikan dampak positif yang lebih besar bagi kesejahteraan masyarakat lokal dan perekonomian daerah.

Daftar Pustaka

- Creswell, J. W. (2009). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. SAGE Publications.
- Dangi, T., & Jamal, T. (2016). *An integrated approach to "sustainable community-based tourism"*. *Sustainability*, 8(5), 475.
- Edwards III, G. C. (1980). *Implementing Public Policy*. Congressional Quarterly Press.
- Fajri, D. N. A. (2024). Sustainable and Feasible: Exploring Motivation Factors Contributing to the Success of Tourism Village Development in Indonesia. *International Studies in Entrepreneurship*, 57, 173–190. https://doi.org/10.1007/978-3-031-54435-4_10

- Hasibuan, R. S. (2024). Analysis of Sustainable Virtual Tourism Development at Conservation Institutions. *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, 1359(1). <https://doi.org/10.1088/1755-1315/1359/1/012065>
- Hendrita, V. (2017). *Kebijakan Pengembangan Pariwisata di Kabupaten Tanah Datar*. Agrifo: Jurnal Agribisnis Universitas Malikussaleh, 2(2), 59-70.
- Kawuryan, M. W. (2022). Sustainable Tourism Development in Indonesia: Bibliometric Review and Analysis. *Indonesian Journal of Geography*, 54(1), 154–166. <https://doi.org/10.22146/ijg.64657>
- Murniati, M. (2021). Entrepreneurship in the tourism industry: Implication on sustainable economic development. *International Symposia in Economic Theory and Econometrics*, 29, 137–156. <https://doi.org/10.1108/S1571-03862021000029B030>
- Nurhadi, F. (2014). *Strategi Pengembangan Pariwisata Oleh Pemerintah Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah*. Jurnal Administrasi Publik Mahasiswa Universitas Brawijaya, 2(2).
- Oktadiana, H. (2024). How do tourism higher education institutions promote sustainable urban tourism development? Insights from Indonesia. *Handbook on Sustainable Urban Tourism*, 546–563. <https://www.scopus.com/inward/record.uri?partnerID=HzOxMe3b&scp=85188871205&origin=inward>
- Prayitno, G. (2023). Social capital for sustainable tourism development in Indonesia. *Cogent Social Sciences*, 10(1). <https://doi.org/10.1080/23311886.2023.2293310>
- Setyanti, S. W. L. H. (2024). Replicating Strategy Model Green HRM and Community-Based Tourism for Sustainable Tourism Development: Evidence in Indonesia. *International Journal of Sustainable Development and Planning*, 19(8), 3129–3139. <https://doi.org/10.18280/ijstdp.190826>
- Ramkissoon, H. (2020). *Perceived social impacts of tourism and quality-of-life: A new conceptual model*. *Journal of Sustainable Tourism*, 28(8), 1083-1099.
- Rusyidi, B., & Fedryansah, M. (2019). *Pengembangan Pariwisata Berbasis Masyarakat. Focus: Jurnal Pekerjaan Sosial*, 1(3), 18-25.
- Silaban, P., Ginting, P., Rini, E. S., & Absah, Y. (2017). *Marketing analysis of North-Sumatera tourism*. *International Journal of Economic Research*, 14(8), 341-353.
- Sinaga, K., Lubis, S., Sihombing, M., & Ritha, M. (2018). *Implementation of Tourism Destination Development Policy in Samosir Regency*. Atlantis Press.
- Turisno, B. E. (2024). Assessing Human Impact on Coral Reef Ecosystems in Berau Regency, Indonesia: Implications for Conservation and Sustainable Tourism Development. *Pakistan Journal of Criminology*, 16(3), 1257–1268. <https://doi.org/10.62271/pjc.16.3.1257.1268>
- Wang, D., Li, X., & Li, Y. (2016). *China's "smart tourism destination" initiative: A taste of the service-dominant logic*. *Journal of Destination Marketing & Management*, 5(2), 76-84.
- Yunikawati, N. A. (2022). Cultural Events: Local Sustainable Tourism Development and Entrepreneurship. *E3S Web of Conferences*, 361. <https://doi.org/10.1051/e3sconf/202236103017>

Zulvianti, N. (2023). The role of pro-environmental behavior in the development of sustainable tourism. *Global Journal of Environmental Science and Management*, 9, 319–330. <https://doi.org/10.22034/GJESM.2023.09.SI.18>